

Cite this:
J.SSE, Vol 2(1): 38-51, 2023

Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dalam Meningkatkan Peran Legislatif di Era Digital

Political Communication Strategy Members Of Nunukan Regency in Improving The Legislative Role in The Digital Age

Taufik¹, Firdaus Muhammad², Ariadin³

¹ Program Studi Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Pasca Sarjana, Universitas Fajar, Kota Makassar, 90231, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Alauddin, Makassar

³ Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sawerigading, Kota Makassar, 90231, Indonesia

*Email: opikkaltara@gmail.com, firdaus.mubammad@uin-alauddin.ac.id, abidinasdar@yahoo.co.id, ariadin@yahoo.com

(Email Institusi: pascasarjana@unifa.ac.id)

Received Date:

13 April 2023

Accepted Date:

6 Mei 2023

Keywords:

Political Communication Strategy, Nunukan DPRD Member, Legislative Role, Digital Era.

Abstract This study aims to determine the Political Communication Strategy of Members of the DPRD of Nunukan Regency in Increasing the Legislative Role in the Digital Era. This research was conducted at the DPRD Secretariat of Nunukan Regency. Data was collected through observation, interviews, and documentation. Data were analyzed using descriptive qualitative analysis with observation and interview methods three sources of DPRD members of Nunukan Regency who came from and represented electoral districts 1, 2, and 3 in Nunukan Regency. Political Communication Strategy is a plan for delivering messages for Nunukan legislators to achieve targets recipients of messages, so that the political communication channels used are social media such as Facebook and the Nunukan DPRD Website in the current digital era. The results of this study found and showed that with observations and interviews in qualitative research methods, the Political Communication Strategy of Nunukan DPRD Members when using social media channels as a form of message delivery influenced every local government policy. Because the communication that occurs is two-way communication, after the political message is processed through the political communication process, the public is influenced to comment on social media. and in the end can change a policy.

Keywords: Political Communication Strategy, Nunukan DPRD Member, Legislative Role, Digital Era

Kata Kunci:

Strategi Komunikasi Politik, Anggota DPRD Nunukan, Peran Legislatif, Era Digital.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Dalam Meningkatkan Peran Legislatif Di Era Digital. Penelitian ini dilaksanakan di Sekretariat DPRD Kabupaten Nunukan. Pengumpulan Data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif dengan metode observasi dan wawancara tiga narasumber anggota DPRD Kabupaten Nunukan yang berasal dan mewakili daerah pemilihan 1, 2, dan 3 di Kabupaten Nunukan.. Strategi Komunikasi Politik merupakan perencanaan penyampaian pesan bagi anggota legislative Nunukan untuk mencapai target sasaran penerima pesan, sehingga saluran komunikasi politik yang di manfaatkan adalah media sosial seperti Facebook dan Website DPRD Nunukan di era digital saat ini. Hasil Penelitian ini menemukan dan menunjukkan bahwa dengan obserwasi dan wawancara dalam metode penelitian kualitatif maka Strategi Komunikasi Poltik Anggota DPRD Nunukan ketika menggunakan saluran media sosial sebagai bentuk penyampaian pesan mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah daerah. Karena komunikasi yang terjadi adalah Komuniasi dua arah, setelah pesan politik diolah melalui proses komunikasi politik, maka masyarakat terpengaruhi untuk berkomentar di media sosial Hal ini menunjukkan bahwa Strategi Komunikasi Poltik yang dijalankan anggota DPRD Kabupaten Nunukan memberi pengaruh kepada masyarakat dan pemerintah daerah di ruang public virtual dan pada akhirnya dapat merubah suatu kebijakan.

Kata Kunci : Strategi Komunikasi Politik, Anggota DPRD Nunukan, Peran Legislatif, Era Digital

PENDAHULUAN

Dunia telah memasuki era baru dimana semua kegiatan bisa dilakukan dengan cara yang lebih canggih, melalui media sosial dan platform digital lainnya. Secara umum era digital merupakan masa yang mengalami perkembangan dan mempengaruhi segala aspek kehidupan, baik sosial, ekonomi maupun politik, bahkan digitalisasi juga sudah merambah ke sektor pendidikan, yang memudahkan setiap individu berkomunikasi tatap muka secara Daring. Inilah zaman dimana semua kegiatan didukung dan dipermudah dengan adanya akses internet yang ditunjang oleh perangkat serba elektronik untuk memenuhi kebutuhan manusia.

Dengan adanya teknologi digital tersebut Komunikasi personal ataupun kelompok ikut berkembang yang pada awalnya hanya dilakukan sebatas proses interaksi *face to face*, kini berkembang secara online tidak hanya dimanfaatkan sebagai komunikasi publik namun digunakan menyampaikan pesan-pesan politik.

Hardirnya digitalisasi informasi politik terdistribusi dalam hitungan detik, membuat para actor politik yang telah menduduki jabatan di parlemen memanfaatkan teknologi digital menyampaikan kebijakan politik, masyarakat pun menyambut kemudian mengomentari kebijakan yang dibangun oleh komunikator politik. Sifat interaktif inilah memungkinkan proses komunikasi politik bisa dilakukan secara intens dan terencana agar menjadi sarana yang efektif dalam proses komunikasi politik.

Media digital membuka ruang komunikasi dan partisipasi politik dengan meningkatkan interaksi antar elemen penting didalamnya yakni partai dan institusi Negara, hal ini dilandasi oleh karakter baru internet yang tidak dimiliki media analog, yaitu interaktif, aktif dan kreatif.

Teknologi digital sangat memfasilitasi proses komunikasi politik para elite, selain pemerintah pusat dan provinsi, juga menjadi sarana pertukaran pesan virtual oleh eksekutif dan legislative di daerah, terutama di Pemerintahan yang berada di wilayah perbatasan Indonesia yakni Kabupaten Nunukan, letaknya yang cukup jauh dari ibu kota Negara, namun memiliki potensi yang luar biasa, meski beberapa wilayah masih terdapat blank spot namun tidak mempengaruhi rasa keingintahuan masyarakatnya terhadap kebijakan pembangunan yang diputuskan pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.

Dalam menjalankan pemerintahan di Kabupaten Nunukan, Anggota DPRD Nunukan sebanyak 25 orang masing masing memiliki peran dalam struktur DPRD Nunukan, ada unsur pimpinan, alat kelengkapan dan juga Fraksi Fraksi. Unsur Pimpinan adalah Ketua dan Wakil Ketua, Alat Kelengkapan terdiri dari Komisi dan badan badan DPRD Nunukan dan Fraksi merupakan pengelompokan anggota DPRD yang terdiri atas kekuatan sosial politik sebagai bentuk representative masyarakat.

STRUKTUR ORAGANISASI DPRD NUNUKAN								
UNSUR PIMPINAN	<p>Hj. LEPPA Ketua DPRD Nunukan</p> <p>SALEH, SE Wakil Ketua DPRD Nunukan</p> <p>BURHANUDDIN, S.HI MM Wakil Ketua DPRD Nunukan</p>							
	<table border="1" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>KOMISI I</u></p> <p>Ketua : Gat, S.Pd Wakil Ketua : Kanain Kornelis, S.IP Sekretaris : Amrin Sitanggang Anggota : Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Hendrawan, S.Pd Ahmad Triady</p> </td> <td style="width: 50%; vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>KOMISI II</u></p> <p>Ketua : Welson Wakil Ketua : Robinson Totong Sekretaris : Lewi, S.Sos Anggota : Hj. Nikmah Inah Anggraini Tri Wahyuni, S.M Hj. Nursan, SH Adama</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>KOMISI III</u></p> <p>Ketua : Hamsing, S.PI Wakil Ketua : St. Raudah Arsyad, ST Sekretaris : Hj. Nadia Anggota : Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Andi Krislina, SE Joni Sabindo, SE</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>BADAN ANGGARAN</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Ahmad Triady Hamsing, S.PI Hj. Nadia Gat, S.Pd Adama Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Welson Lewi, S.Sos Amrin Sitanggang</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>BADAN MUSYAWARAH</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Kanain Kornelis, S.IP Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE St. Raudah Arsyad, ST Joni Sabindo, SE Hj. Nursan, SH</p> </td> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>BADAN PEMBENTUKAN PERDA</u></p> <p>Ketua : Hendrawan, S.Pd Wakil Ketua : Hj. Nikmah Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Tri Wahyuni, S.M Gat, S.Pd Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE Hj. Nursan, SH</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;"> <p style="text-align: center;"><u>BADAN KEHORMATAN</u></p> <p>Ketua : Amrin Sitanggang Wakil Ketua : Adama Anggota : Ahmad Triady</p> </td> <td></td> </tr> </table>	<p style="text-align: center;"><u>KOMISI I</u></p> <p>Ketua : Gat, S.Pd Wakil Ketua : Kanain Kornelis, S.IP Sekretaris : Amrin Sitanggang Anggota : Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Hendrawan, S.Pd Ahmad Triady</p>	<p style="text-align: center;"><u>KOMISI II</u></p> <p>Ketua : Welson Wakil Ketua : Robinson Totong Sekretaris : Lewi, S.Sos Anggota : Hj. Nikmah Inah Anggraini Tri Wahyuni, S.M Hj. Nursan, SH Adama</p>	<p style="text-align: center;"><u>KOMISI III</u></p> <p>Ketua : Hamsing, S.PI Wakil Ketua : St. Raudah Arsyad, ST Sekretaris : Hj. Nadia Anggota : Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Andi Krislina, SE Joni Sabindo, SE</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN ANGGARAN</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Ahmad Triady Hamsing, S.PI Hj. Nadia Gat, S.Pd Adama Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Welson Lewi, S.Sos Amrin Sitanggang</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN MUSYAWARAH</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Kanain Kornelis, S.IP Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE St. Raudah Arsyad, ST Joni Sabindo, SE Hj. Nursan, SH</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN PEMBENTUKAN PERDA</u></p> <p>Ketua : Hendrawan, S.Pd Wakil Ketua : Hj. Nikmah Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Tri Wahyuni, S.M Gat, S.Pd Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE Hj. Nursan, SH</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN KEHORMATAN</u></p> <p>Ketua : Amrin Sitanggang Wakil Ketua : Adama Anggota : Ahmad Triady</p>
<p style="text-align: center;"><u>KOMISI I</u></p> <p>Ketua : Gat, S.Pd Wakil Ketua : Kanain Kornelis, S.IP Sekretaris : Amrin Sitanggang Anggota : Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Hendrawan, S.Pd Ahmad Triady</p>	<p style="text-align: center;"><u>KOMISI II</u></p> <p>Ketua : Welson Wakil Ketua : Robinson Totong Sekretaris : Lewi, S.Sos Anggota : Hj. Nikmah Inah Anggraini Tri Wahyuni, S.M Hj. Nursan, SH Adama</p>							
<p style="text-align: center;"><u>KOMISI III</u></p> <p>Ketua : Hamsing, S.PI Wakil Ketua : St. Raudah Arsyad, ST Sekretaris : Hj. Nadia Anggota : Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Andi Krislina, SE Joni Sabindo, SE</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN ANGGARAN</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Ahmad Triady Hamsing, S.PI Hj. Nadia Gat, S.Pd Adama Andre Pratama H. A. Mutammir, SE, MM Welson Lewi, S.Sos Amrin Sitanggang</p>							
<p style="text-align: center;"><u>BADAN MUSYAWARAH</u></p> <p>Ketua : Hj. Leppa Wakil Ketua : Saleh, SE Wakil Ketua : Burhanuddin, S.HI, MM Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Kanain Kornelis, S.IP Jainuddin, SE Darmawansyah, SE Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE St. Raudah Arsyad, ST Joni Sabindo, SE Hj. Nursan, SH</p>	<p style="text-align: center;"><u>BADAN PEMBENTUKAN PERDA</u></p> <p>Ketua : Hendrawan, S.Pd Wakil Ketua : Hj. Nikmah Sekretaris : Drs. M. Efendi (Bkn. Agt) Anggota : Tri Wahyuni, S.M Gat, S.Pd Robinson Totong Inah Anggraini Andi Krislina, SE Hj. Nursan, SH</p>							
<p style="text-align: center;"><u>BADAN KEHORMATAN</u></p> <p>Ketua : Amrin Sitanggang Wakil Ketua : Adama Anggota : Ahmad Triady</p>								
ALAT KELENGKAPAN								

Sumber : Bagian Persidangan dan Perundangan Sekretariat DPRD Nunukan

Gambar 1. Struktur Kelembagaan DPRD Kabupaten Nunukan

FRAKSI - FRAKSI	FRAKSI PARTAI HANURA	FRAKSI PARTAI DEMOKRAT
	Ketua : Hj. Nikmah Wakil Ketua : Jainuddin, SE Sekretaris : Hamsing, S.Pi Anggota : Hj. Leppa Ahmad Triady Kanain Kornelis, S.IP Tri Wahyuni, S.M	Ketua : Gat, S.Pd Wakil Ketua : Saleh, SE Sekretaris : Robinson Totong Anggota : Hj. Nadia Darmawansyah, S.Sos
	FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	FRAKSI PERJUANGAN PESATUAN NASIONAL
	Ketua : Adama Wakil Ketua : Andi Krislina, SE Sekretaris : Inah Anggraini Anggota : Burhanuddin, S.HI, MM Andre Pratama	Ketua : Lewi, S.Sos Wakil Ketua : Amrin Sitanggang Sekretaris : Hendrawan, S.Pd Bendahara : Joni Sabindo, SE
FRAKSI GERAKAN KARYA PEMBANGUNAN		
Ketua : St. Raudah Arsyad, ST Wakil Ketua : H. A. Mutammir, SE, MM Sekretaris : Hj. Nursan, SH Anggota : Welson		

Sumber : Bagian Persidangan dan Perundangan Sekretariat DPRD Nunukan

Gambar 1. Struktur Kelembagaan DPRD Kabupaten Nunukan (lanjutan)

Dalam menjalankan tugasnya seorang wakil rakyat harus tahu dengan apa yang diinginkan oleh konstituen yang diwakilinya. Banyak cara yang harus dilakukan oleh wakil rakyat untuk mengetahui apa yang diinginkan oleh masyarakat. Dalam hal proses penyampaian aspirasi rakyat inilah dibutuhkan yang namanya komunikasi, yaitu komunikasi politik. Salah satunya dengan melakukan komunikasi antara keduanya. Melakukan komunikasi dengan konstituennya adalah hal wajib yang tak bisa dielakkan oleh wakil rakyat.

Komunikasi politik anggota dewan ini perlu dilakukan, untuk mengetahui sejauh mana anggota dewan telah melakukan komunikasi politik kepada konstituennya secara tepat. Apakah mereka melakukan komunikasi politik secara tepat waktu, tepat sasaran, tepat saluran, dan tepat guna? Apakah anggota dewan benar-benar melakukan penjangkaran aspirasi warga untuk setiap pengambilan keputusannya? Bila tidak, apakah dasar anggota Dewan tersebut dalam membuat usulan draft rancangan peraturan daerah dan pembuatan kebijakan publik lainnya? Bagaimana bentuk komunikasi politik yang dilakukan oleh anggota DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat beserta hasil-hasilnya? Selama masa periode kedudukannya sebagai anggota Dewan lima tahun masa tugas, berapa kali mereka turun lapangan menjaring aspirasi masyarakat? Apakah ada kontrak politik yang dilakukan selama masa kampanye dapat dipenuhi setelah mereka menduduki kursi anggota DPRD Kabupaten Nunukan?

Dalam Penelitian ini penulis berpendapat bahwa mahalnya media analog membuat beberapa kegiatan legislatif terlihat asal asalan sistem pelaporan diduga banyak yang fiktif atau hanya sekedar memasang spanduk kegiatan kemudian didokumentasikan dalam laporan kegiatan dan tidak menggambarkan serta menjabarkan kepentingan masyarakat, justru yang ditengahkan dalam penyerapan aspirasi hanya berupa laporan kegiatan yang bisa dimanipulasi staf Sekretariat DPRD sebagai bentuk pertanggungjawaban kegiatan. Dugaan demikian dapat menunjukkan citra negatif terhadap anggota DPRD ke masyarakat misalnya terjadinya praktek korupsi, tidak produktif menghasilkan Raperda atau sikap elit politik jauh dari pandangan masyarakat dan tuntutan untuk menaikkan tunjangan dipandang negatif meski dengan tujuan mencegah praktek korupsi.

Koordinator Devisi Korupsi Politik Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz menilai anggota DPRD belum layak menerima kenaikan tunjangan dan gaji karena kinerja DPRD masih rendah dapat dibuktikan pada fungsi, peran tata kelola secara kelembagaan. Hal ini juga seiring dengan partisipasi politik masyarakat sangat terbatas karena tidak ditunjang oleh peran komunikasi politik anggota dewan. Politik hanya dijadikan alat disetiap perhelatan pesta demokrasi, membuat interkasi komunikasi politik sebatas kontrak politik dan setelah terpilih masyarakat ditinggalkan, dan jauh dari kepentingan rakyat.

Karena itu mengkolaborasikan setiap agenda kegiatan kedewanan, anggota DPRD Kabupaten Nunukan perlu memanfaatkan media virtual di era digital saat ini, dimana hal tersebut merupakan wadah komunikasi politik bagi anggota dewan dengan konstituennya secara langsung, sebab Komunikasi akan berjalan baik jika ada feed back dari masyarakat, terutama menampung keluhan masyarakat terhadap pembangunan daerah, jadi bukan hanya ketika pemilihan legislatif rajin menemui dan menampung aspirasi konstituen tetapi lebih membangun hubungan yang lebih intens melalui perangkat digital yang terjadwalkan sesuai dengan isu komunikasi politik yang hendak disampaikan oleh alat kelengkapan DPRD Nunukan begitupula dengan anggota DPRD yang tergabung dalam fraksi atau perwakilan partai politik.

Anggota DPRD Kabupaten Nunukan adalah aktor politik, mereka lahir dari Konstituen sebagai bentuk perwakilan masyarakat untuk mengambil dan memutuskan kebijakan di pemerintahan, karena itu setiap anggota dewan wajib merumuskan kebijakan politik untuk membangun masyarakat di daerah pemilihan masing masing sehingga arah kebijakan pembangunan tepat sasaran bukan untuk kepentingan pribadi atau partai dalam memenuhi pundi pundi pendanaan melainkan mengarahkan program pembangunan untuk kemajuan, kesejahteraan masyarakat.

Komunikasi Politik di era digital sangat penting saat ini, karena dapat menghubungkan seseorang secara global, bekerjasama kapan dan dimana saja, untuk melakukan kegiatan politik mempengaruhi dan menstimulus konstituen baik hubungan suprastruktur maupun infrastruktur. Pesan politik akan berlangsung mengikuti perubahan dan perkembangan informasi yang diinginkan masyarakat, tinggal bagaimana para elite politik atau Komunikator Politik mengolah isi, tujuan dan keinginan pesan politik yang disampikannya untuk mempengaruhi dan membentuk opini public serta mendapat tanggapan diruang publik.(Hariyanto, 2019)

Dalam proses komunikasi, Komunikasi politik di era digital menawarkan karakter dan pola baru dalam berkomunikasi yaitu langsung, terdesentralisasi, dua arah interaktif dan berjaringan menggunakan internet yang dapat membuka kanal komunikasi langsung antara publik (citizen) dengan elit politik, seperti yang dikemukakan Holmes (2005) bahwa karakter digital dapat mewakili analog atau tradisional, Pertama Digitalisasi terdesentralisasi sementara analog tersentralisasi. Karakter tersebut mengubah proses komunikasi politik yang sebelumnya dari satu orang ke banyak orang (one to many) kini menjadi dari banyak orang ke banyak orang (many to many), Komunikasi Politik kalangan elit tentu berkurang menjadi komunikator aktif dan dapat mengemansipasi public menjadi public yang aktif, Publik bisa menggalang kekuatan kolektif menggunakan infrastruktur digital untuk memperjuangkan kepentingannya, selain itu netizen juga bisa membentuk jaringan sosial yang memungkinkan koordinasi, membuka ruang debat politik, membangun ruang publik interaktif, memobilisasi hingga mengkoordinasi aksi secara bersamaan.

Kedua, Digitalisasi membuka komunikasi dua arah (two way of communication) sementara Analog hanya satu arah (one way komunikasi). Media sosial misalnya, merupakan ruang yang memungkinkan para aktor demokrasi dapat berkomunikasi langsung dua arah yang sebelumnya tidak dilakukan media analog. Bahkan saat ini publik bisa berbicara langsung dengan presiden melalui akun media sosial. Ketiga, Digitalisasi memiliki kemampuan menghindari kontrol kekuatan tertentu, sementara televisi mudah dikontrol. Casstell (2009) menyebut bahwa masyarakat yang ada di internet masyarakat jaringan (network society) yang membangun jaringan antar tak terbatas yang tidak dapat disensor dengan mudah. Jaringan itu bisa berupa jaringan informasi, jaringan warga sipil, jaringan perusahaan. Sementara media analog merupakan media elektronik yang masih mudah dikontrol oleh segelintir orang saja, misalnya dalam kasus Indonesia yakni konglomerat yang memiliki media.

Dari sejumlah pandangan diatas tentu membutuhkan strategi komunikasi politik agar pesan politik yang disampaikan anggota legislative Kabupaten Nunukan tepat sasaran artinya pesan yang disampaikan dapat dipahami komunikan atau penerima pesan. Sesuai dengan pengamatan penulis ini selama bekerja sebagai staf di Kantor DPRD Nunukan masih

memanfaatkan media analog yang menurut penulis menggunakan alokasi anggaran yang cukup besar, dibanding dengan memanfaatkan media digital sebagai ruang publik, selain murah penyampaian pesan lebih cepat dan mendapatkan respon secara massif diruang publik.

Penyusunan strategi komunikasi politik harus terlaksana sehingga pesan politik yang diharapkan bersama antara Komunikator dan Komunikan mengarah ke suatu tujuan, sebagaimana yang diutarakan Achmad (2020) bahwa suatu lembaga perlu merencanakan rangkaian kegiatan yang didesain untuk mencapai tujuan tertentu, karena itu setiap agenda perlu pengidentifikasian dan penetapan spesifikasi dan kualifikasi pencapaian hasil dan menjadi sasaran usaha dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang memerlukannya dari awal hingga akhir perencanaan, begitupula dengan penentuan waktu mengkomunikasikan pesan pesan politik dalam mencapai tujuan. (Kumaini & Anwar, n.d.)

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Bagaimana Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Nunukan?
2. Apakah Strategi Komunikasi Politik Dapat Meningkatkan Peran Legislatif Di Era Digital?
3. Apa Manfaat Digitalisasi Dalam Proses Komunikasi Politik?

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berperan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang bertindak sebagai informan, dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini mengarah pada latar dari individu yang mewakili populasi tersebut secara holistic. Peneliti menganalisis dan memberikan gambaran secara cermat dan faktual tentang focus dan locus yaitu bagaimana Strategi Komunikasi Politik yang dilakukan oleh Anggota DPRD Nunukan dalam meningkatkan peran legislative di era digital.

Metode pendekatan deskriptif lebih spesifik digunakan pada penelitian ini memberikan gambaran atau penjabaran suatu objek penelitian berdasarkan karakteristik yang dimiliki, sehingga peneliti terjun langsung ke lapangan. Istilah deskriptif berasal dari istilah Bahasa Inggris *to describe* yang berarti memaparkan atau menggambarkan sesuatu hal. Misalnya keadaan, kondisi, situasi, peristiwa, kegiatan, dan lain-lain. Dengan demikian yang dimaksud dengan penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal lain-lain yang sudah disebutkan, yang hasilnya dipaparkan dalam bentuk laporan penelitian.

Sedangkan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang digunakan pada penelitian ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi mengenai sejauh mana Strategi Komunikasi Anggota DPRD Nunukan dalam meningkatkan Peran Legislatif di era digital. Selain itu, dengan pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan situasi dan permasalahan yang menghambat komunikasi sehingga Komunikasi Politik Anggota DPRD Nunukan dapat meningkatkan peran legislative di era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Teknologi Di Era Digital

Perkembangan teknologi di era modern saat ini semakin pesat, seiring dengan meningkatnya pengguna teknologi digital. Media sosial seperti Instagram, Facebook, Twitter dan Youtube telah menjadi sarana penyampaian pesan yang melibatkan komunikasi dua arah antara komunikan dan komunikator. Selain komunikasi dua arah, pesan yang disampaikan juga dapat memberikan pemahaman langsung kepada penerima pesan terkait maksud dan tujuan komunikasi yang ingin disampaikan ke ruang publik untuk menjawab ketidakpastian informasi yang diterima masyarakat.

Di Indonesia pada medium Februari 2022 WebAreSocial mencatat pengguna internet di dunia maya mencapai 204,7 juta orang dari total jumlah penduduk 277,7 juta jiwa dengan pengguna media sosial sebanyak 191,4 juta. Berbanding terbalik pada tahun sebelumnya

yakni pada Januari 2021 ada kenaikan 1 persen atau 2,1 juta pengguna internet di Negeri ini.



Sumber: We Are Social

Gambar 2. Digital Indonesia Bulan Pebruari 2022

Sementara itu, pengguna teknologi digital internet di Kalimantan Utara mencapai hingga 97,55 persen yang mengakses internet melalui gadget atau Android, khusus di Kabupaten Nunukan data BPS Kaltara 96,83 persen. Kalimantan Utara khususnya di Kabupaten Nunukan menjadi wilayah yang paling sering mengakses media sosial terutama Facebook. Berdasarkan data hasil survey BPS Kalimantan Utara yang melibatkan 7.568 responden pada 11 Januari hingga 24 Februari 2022. Magin error survey ini mencapai +/- 1.13 persen dengan tingkat kepercayaan 95 Persen.

Kabupaten/Kota dan Provinsi	Mengakses Internet dalam 3 Bulan Terakhir Menurut Alat yang Digunakan (Perempuan) (Persen)				
	Komputer/Desktop	Laptop/Notebook	Tablet	HP/Ponsel	Lainnya
	2019 ↑↓	2019 ↑↓	2019 ↑↓	2019 ↑↓	2019 ↑↓
Malinau	3,41	11,90	1,19	98,84	0,00
Bulungan	4,47	19,47	2,17	98,41	0,45
Tana Tidung	2,53	5,25	2,22	97,92	0,11
Nunukan	5,86	12,53	2,23	96,83	0,06
Tarakan	6,03	23,19	1,98	97,32	0,00
Kalimantan Utara	5,38	18,57	2,01	97,55	0,10

Sumber: BPS Kalimantan Utara, 2019

Gambar 3. Akses internet tiga bulan terakhir 2019

Tingginya pengguna teknologi digital menunjukkan sebuah kebutuhan yang tidak dapat ditolak dalam realitas kehidupan modern ini. Teknologi menjadi keniscayaan dalam kehidupan manusia yang mengubah dan membawa masyarakat kedalam fase peradaban. Perubahan budaya masyarakat yang diakibatkan perkembangan teknologi dalam ranah teoritis, berada dalam lingkup determinisme teknologi yang mendorong perubahan sosial, maka tak heran jika media komunikasi salah satu bentuk kemajuan teknologi ikut berperan dan berpotensi mengubah pola dan gaya hidup masyarakat. Demikian teknologi digital yang terus mengokupansi ruang publik baru melalui media sosial, media baru menciptakan peradaban manusia ruang publik virtual menjadi alternative bagi manusia tidak hanya berinteraksi tetapi juga mengekspresikan diri, gagasan dan propaganda. (Yasonna laoly, 190:2022).

Jurgen Habermas mengandaikan ruang publik sebagai arena inklusif dan pluralis bagi setiap orang untuk bisa berpartisipasi dalam arena tersebut yaitu mendorong publik untuk berdiskusi satu sama lainnya. Konsepnya adalah mengutamakan *dialogical conception* atau konsep dialogis dengan asumsi bahwa individu datang bersama sama ke lokasi yang sama dan terjadi dialog satu sama lain dalam percakapan *face to face*. Terkait hal ini Jurgen Habermas membedakan tiga jenis ruang publik, *Pertama, Politische Offentlichkeit* yang berarti ruang public wilayah politis, *Kedua, Literarische offentlichkeit* diterjemahkan sebagai ruang public

sastra atau literasi tulis menulis. *Ketiga, Refresmentatif offentlicheit* yaitu perepresentasian atau perwakilan public yang mempertunjukkan kehormatan di depan khalayak.

Ketiga ruang public tersebut memberikan pengaruh terhadap kebijakan Negara, ruang ini akan membentuk opini public yang pusparagam yang diterjemahkan dari perspektif masing masing individu dan menjadi opini melalui partisipasi debat public bebas adil dan terbuka bagi semua. Namun terkadang hal tersebut terlupakan oleh pemerintah, bahwa di era digital saat ini ruang publik begitu luas, sistematis dan massif yang dapat menjadi factor penekan yang dilakukan oleh Politisi, aktifis, jurnalis bahkan birokrat karena mereka sudah semakin terbiasa menggunakan internet sehingga memudahkan untuk berinteraksi langsung secara massif, meskipun tidak aktif menggunakan fasilitas internet, paling tidak mereka pernah menggunakan untuk mempengaruhi setiap kebijakan pemerintah baik skala nasional, provinsi dan daerah.

Di Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara perkembangan teknologi digital ruang maya sudah begitu optimal meskipun ada sebagian kecil wilayah yang belum sepenuhnya terjangkau jaringan internet (Blank Spot) terutama di pelosok desa yang terletak tepat digaris batas Negara yakni sebagian di wilayah Kecamatan Sebatik Utara, dan Kecamatan Lumbis Pasiangan dan Kecamatan Krayan Selatan yang berbatasan langsung dengan dua Negara Malaysia dan Brunai Darussalam.

Wilayah I	Nunukan	32	BTS
	Nunukan Selatan	15	BTS
	Jumlah	47	BTS
Wilayah II	Sebatik	13	BTS
	Sebatik Barat	6	BTS
	Sebatik Tengah	10	BTS
	Sebatik Timur	8	BTS
	Sebatik Utara	5	BTS
Jumlah	42	BTS	
Wilayah III	Lumbis	3	BTS
	Lumbis Hulu	1	BTS
	Lumbis Ogong	9	BTS
	Lumbis Pasiangan	3	BTS
	Sebuku	7	BTS
	Sei Menggaris	9	BTS
	Sembakung	11	BTS
	Sembakung Atulai	3	BTS
Tulin Onsoi	5	BTS	
Jumlah	51	BTS	
Wilayah III	Krayan	5	BTS
	Krayan Barat	2	BTS
	Krayan Selatan	2	BTS
	Krayan Tengah	3	BTS
	Krayan Timur	4	BTS
Jumlah	16	BTS	
Total BTS Jaringan Telkomsel		156	BTS

Sumber: Diskominfo Kabupaten Nunukan – gis.nunukankab.go.id

Gambar 4. Daftar Menara BTS Jaringan Telkomsel Nunukan

Dengan dibangunnya 156 menara jaringan Base Transceiver Station (BTS) 95 persen wilayah sudah terjangkau jaringan telekomunikasi yang dapat dimanfaatkan sebagai akses ke teknologi digital. BTS jaringan Telekomunikasi merupakan factor pendukung layanan telekomunikasi seluler untuk memenuhi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, karena tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi digital saat ini semakin meningkat termasuk salah satunya adalah teknologi telekomunikasi.

Meski demikian Kota Nunukan dan beberapa Kecamatan Lainnya hingga kini menunjukkan trend positif terhadap persebaran pengguna teknologi digital, sehingga membicarakan aktifitas online dalam Komunikasi Politik di Media Sosial menunjukkan efek kognitif dan partisipasi politik masyarakat membentuk ruang virtual yang di dalamnya terdapat aktor politik, tokoh politik dan aktifis politik dalam group media sosial dan berperan menjadi corong utama komunikasi politik yang pada akhirnya menghasilkan berbagai kebijakan, usulan kebijakan, pernyataan dan komentar lainnya terkait kebijakan pemerintah daerah.

Berikut Komposisi Anggota DPRD Nunukan masa jabatan 2019 – 2024 per daerah pemilihan (dapil).

NO	NAMA	PARTAI	JABATAN	DAERAH PEMILIHAN
1	Hj. Leppa	Hanura	Ketua DPRD	I
2	Saleh SE	Demokrat	Wakil Ketua DPRD	
3	Ahmad Triyadi	Hanura	Anggota BK	
4	Zainuddin, SE	Hanura	Anggota Komisi III	
5	Siti Raudah Arsyad, ST	Golkar	Wakil Ketua Komisi III	
6	Inah Anggraini	PKS	Anggota komisi II	
7	Darmawansyah	Demokrat	Anggota Komisi III	
8	Robinson Totong	Demokrat	Wakil Ketua komisi II	
9	Joni Sabindo	PDI-P	Anggota Komisi III	
10	H. Andi Mutamir SE MM	PPP	Anggota Banggar	
11	Adama	PKS	Anggota Banggar	
12	Hj. Nikmah	Hanura	Wakil Ketua Bapemperda	II
13	Hj. Nursan	Gerindra	Anggota Bapemperda	
14	Hj. Nadia	Demokrat	Anggota Banggar	
15	Hamsing, S.IP	Hanura	Ketua Komisi III	
16	Andre Pratama	PBB	Anggota Komisi I	
17	Burhanuddin S.HI. MM	PKS	Wakil Ketua DPRD	
18	Gat Kaleb, S.Pd	Demokrat	Ketua Komisi I	III
19	Welson	Golkar	Ketua Komisi III	
20	Hendrawan	Nasdem	Ketua Bapemperda	
21	Lewi, S.Sos	PDI-P	Sekretaris Komisi II	
22	Kanain Kornelis	Hanura	Wakil Ketua Komisi I	
23	Amrin Sitanggang	Perindo	Sekretaris Komisi I	
24	Andi Krislina	PKS	Anggota Komisi III	
25	Tri Wahyuni	Hanura	Anggota Komisi II	

Sumber: pubdok sekretariat DPRD Nunukan – dprd.nunukankab.go.id

Gambar 5. Daftar Nama Anggota DPRD Kabupaten Nunukan Masa Jabatan 2019 – 2024

Dalam geopolitik di wilayah perbatasan, masyarakat Kabupaten Nunukan di petakan dalam 3 wilayah yang lebih dikenal dengan istilah daerah pemilihan (dapil). Dapil 1 terdiri dari 4 Kecamatan yakni Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan Utara, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Nunukan Barat. Dapil 2 terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Sebatik Barat, Kecamatan Sebatik Timur, dan Kecamatan Sebatik Induk. Dapil 3 terdiri dari 13 Kecamatan, meliputi, Kecamatan Seimenggaris, Kecamatan Sebuku, Kecamatan Sembakung, Kecamatan Sembakung Atulai, Kecamatan Tulin Onsoi, Kecamatan Lumbis, Kecamatan Lumbis Ogong, Kecamatan Lumbis Pansiang, Kecamatan Krayan Induk, Kecamatan Krayan Barat, Kecamatan Krayan Tengah, Kecamatan Krayan Timur dan Kecamatan Krayan Selatan.

Dengan adanya pembagian wilayah atau daerah pemilihan tersebut setiap anggota DPRD bertanggungjawab terhadap konstituennya yang berbeda latar belakang pendidikan, karena itu perlu sebuah perencanaan komunikasi politik tentang penyampaian pesan terkait dengan fungsi legislasi agar terhindar dari kepentingan di luar tugas dan wewenang DPRD. Perencanaan komunikasi politik dilakukan untuk menjamin berlangsungnya interaksi antara anggota DPRD dengan masyarakat di setiap daerah pemilihan.

2. Strategi Komunikasi Politik

Dalam konteks Strategi Komunikasi Politik, anggota legislative berperan penting dalam memformulasi kebijakan komunikasi dalam bentuk undang undang, baik terkait alokasi dana maupun yang berhubungan dengan pengoperasian sumber daya komunikasi. Kebijakan komunikasi tersebut memiliki ruang lingkup yang luas untuk mencapai suatu kesamaan semangat terhadap program pemerintah yang mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya komunikasi untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat, terencana dan sistematis.

3. Anggota DPRD Sebagai Komunikator Politik

Sebagai Komunikator Politik anggota DPRD berada diposisi strategis memainkan peran politik dalam suatu agenda setting tertentu. Menurut Nimmo (1993:72), Politisi sebagai komunikator politik memainkan peran sosial utama, terutama dalam proses pembentukan opini publik. Politikus berkomunikasi sebagai wakil kelompok yang menyampaikan pesan politik mengajukan dan melindungi tujuan kepentingan politik, untuk mencari pengaruh

melalui komunikasi politik.

Lelly Arrienie (2016:17) mengatakan pekerjaan utama politisi sebagai aktor politik, berperan atas nama rakyat, namun kenyataannya memperlihatkan tindakan atas nama kelompok partai yang mengantarkannya sebagai wakil rakyat. Ketidakkonsistenan peran atas nama lembaga perwakilan rakyat justru melenceng dari tatanan demokrasi, karena mereka menganggap bahwa dirinya sebagai orang besar yang mewakili kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri.

Sebagai Komunikator Politik di panggung legislatif, anggota DPRD seharusnya menyampaikan komunikasi secara kelembagaan, Komunikasi yang didalamnya memuat agenda kebijakan politik yang memberikan nilai positif kepada rakyat disampaikan melalui saluran komunikasi yang cepat, efektif, efisien secara sistematis dan massif di era digital saat ini. Namun apakah teknologi digital menjadi solusi terhadap penyampaian Komunikasi Politik anggota legislatif ataukah hanya sekedar mengurangi biaya publikasi pada saluran Komunikasi Politik di level virtual.

Sebagai titik fokus dalam pembahasan idealnya Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Nunukan sebagai berikut:

a. Strategi Komunikasi Politik Anggota DPRD Nunukan.

Komunikasi Politik Anggota DPRD Kabupaten Nunukan membutuhkan perencanaan dan pola penyampaian Komunikasi, karna 25 orang anggota DPRD tentu memiliki latarbelakang pendidikan yang berbeda dan dapat dipastikan untuk menggunakan saluran teknologi digital dianggap belum maksimal.

Wakil Ketua DPRD Nunukan Burhanuddin S.HI, MM mengatakan, salah satu hal yang harus dimiliki politisi adalah melek teknologi agar mempermudah menyampaikan komunikasi dengan menggunakan sistem informasi teknologi digital. Meskipun sistem kinerjanya berbeda namun hal ini sangat membantu menyampaikan pesan politik melalui media sosial dan harus dipelajari oleh anggota DPRD Nunukan. Untuk sukses menyampaikan komunikasi politik, menurut Burhanuddin, Anggota DPRD Nunukan perlu memperbanyak jaringan dan menguasai teknologi. Jika dua hal ini bisa didapatkan dan di implementasikan maka sukses dalam bidang apapun termasuk di bidang politik.

Salah satu strategi yang digunakan, kata Wakil Ketua DPRD Nunukan ini, terkait dengan tupoksi humas yang juga dapat membantu mempublikasikan komunikasi politik anggota dewan terutama agenda yang berkaitan dengan Rapat Paripurna, Rapat Dengar Pendapat (Hearing), Kunjungan Kerja dan Pembahasan dan Penetapan Peraturan Daerah serta pembahasan anggaran pembangunan daerah di Kabupaten Nunukan. Kegiatan kedewanan apabila di publikasikan melalui media bisa memberikan nilai positif terhadap kinerja anggota dewan, misalnya selama ini anggota dewan dinilai tidak dapat bekerja maka bagian humas DPRD Nunukan bertanggungjawab mensosialisasikan seluruh agenda kegiatan anggota legislative.

Komunikasi Politik di kantor DPRD Nunukan di era digital saat ini masih perlu ditingkatkan karna masih banyak hal krusial yang belum tersosialisasikan. Ini membutuhkan kreatifitas dari tim publikasi dan dokumentasi sekretariat DPRD Nunukan untuk kemudian memprogramkan sosialisasi kebijakan dan komunikasi politik anggota DPRD Nunukan dengan menggunakan teknologi digital. Persaingan penyampaian pesan sangat bagus dan media sudah mulai menjamur, termasuk media online sehingga sekecil apapun persoalan ketika sudah di *blow up* oleh media menjadi sesuatu yang luar biasa.

Komunikasi Politik di Era Digital menurut Lewi S.Sos menyajikan kecepatan informasi, meskipun disadari bahwa jaringan internet di Kabupaten Nunukan terutama di Daerah Pemilihan Tiga, Kecamatan Lumbis, Lumbis, Ogong, Lumbis Atulai, Sembakung, Sembakung Atulai, Tulin Onsoi, Seimenggarasi, Krayan Induk, Krayan Selatan, Krayan Timur dan Krayan Barat, masih sangat lemah, namun pola komunikasi politik anggota DPRD Nunukan dilakukan dengan tatap muka. Hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi anggota dewan ketika menyambangi konstituen

di wilayah tersebut karena kondisi geografis hanya dapat dilalui dengan pesawat udara dan jalur aliran sungai menggunakan speed boat yang tentunya membutuhkan cost yang banyak.

Terkait dengan penggunaan saluran komunikasi politik masing-masing anggota dewan, Lewi mengharapkan agar menggunakan teknologi digital, karena selain murah, informasi yang disampaikan juga sangat cepat, sementara media cetak sangat terbatas, apalagi di era digital saat ini, Informasi apapun sangat ditentukan oleh teknologi digital melalui media digital termasuk media online, whatsapp, youtube.

Dengan perkembangan pemanfaatan teknologi digital saat ini digunakan semaksimal mungkin dalam hal yang positif meskipun media cetak tetap dipertahankan namun dengan adanya perubahan analog ke digital harus dimanfaatkan dengan baik terutama di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan.

Menurut H. Andi Mutamir, SE., M.M Pemanfaatan teknologi di era digital saat ini wajib di implementasikan setiap anggota DPRD Nunukan, sebagai aktor Politik yang memiliki pengaruh di lingkungan partai dan masyarakat tentu media digital dapat dijadikan saluran komunikasi politik agar pesan yang disampaikan kemasyarakat cepat direspon nitizen sehingga terjadi komunikasi dua arah, artinya respon positif masyarakat terhadap kebijakan pemerintah merupakan masukan saran dan gagasan yang bersumber dari masyarakat, hal ini menunjukkan bahwa konstituen mendapatkan peran sebagai objek pembangunan.

Secara kelembagaan DPRD Nunukan perlu dibantu oleh staf sekretariat DPRD dalam proses perencanaan Komunikasi Politik terutama menilai saluran efektif dalam mempublikasikan pesan komunikasi politik sesuai dengan agenda kerja DPRD Nunukan, ini harus dibarengi dengan anggaran pembiayaan publikasi baik media cetak, maupun media online sehingga anggaran publikasi perlu mendapatkan porsi yang layak bukan hanya di Pemerintah Daerah saja anggarannya hingga milyaran rupiah.

b. Strategi Komunikasi Politik Dapat Meningkatkan Peran Legislatif Di Era Digital.

Dari pengamatan yang dilakukan penulis sejak mengikuti sejumlah agenda penjangkaran Aspirasi Masyarakat dan Kunjungan Dalam Daerah, Komunikasi Politik anggota DPRD Nunukan memberikan penilaian tersendiri dalam meningkatkan peran legislatif di era digital. Dalam hal ini penulis terlibat langsung mengamati dan menulis aspirasi masyarakat kemudian diminta mempublikasikannya melalui media sosial dan website dprd.nunukankab.go.id usai pelaksanaan reses. Beragam aspirasi yang disampaikan masyarakat dalam reses tersebut lalu kemudian anggota DPRD Nunukan menanggapi kemudian memasukkan aspirasi tersebut kedalam pokok-pokok pikiran DPRD Nunukan.

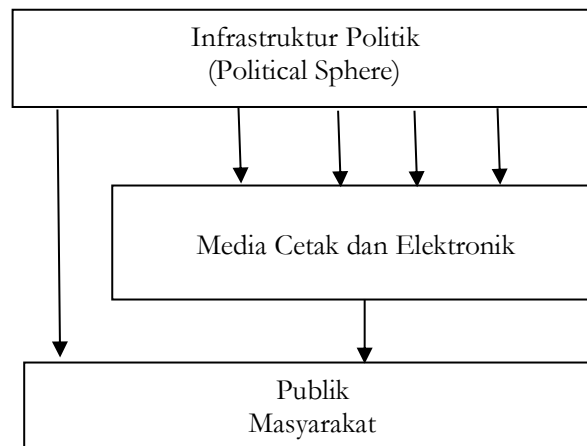
Menurut Prof, Dr. Burhan Bungin S.Sos. M.Si., Ph.D. dalam Komunikasi Politik Pencitraan (187:2018) Hiperrealitas adalah realitas yang diciptakan oleh media tentang sebuah realitas yang sedang berlangsung atau pernah terjadi. Hiperrealitas dapat dibangun melalui : Strategi Siklus menghidupkan kembali demokrasi dalam pikiran seseorang, reformasi baru yang ditujukan ke pemerintah berjalan seperti urusan bisnis, skema konstitusional yang menjadi landasan pijakan institusi dan Solusi komunitarian berdasarkan keterlibatan warga. Hiperrealitas media sulit diukur secara kuantitatif karena merupakan masalah yang dihadapi pemerintah dalam memberi landasan yang kuat untuk mengatur hipperrealitas.

Adanya media sosial sebagai ruang publik dalam menjembatani saluran Komunikasi Politik ke masyarakat, meskipun satu peristiwa dipahami dan dimaknai secara berbeda bagi setiap Individu, namun informasi Komunikasi Politik cukup menjadi perhatian di dunia maya, karena media mampu digital mampu menampilkan sebuah fakta peristiwa dari beragam arah dan sudut pandang, Teori Hierarki ini menjadi landasan proses Komunikasi Politik menggunakan saluran media sosial. Komunikasi Politik akan semakin berpengaruh apabila direncanakan sebelumnya, sehingga pesan yang sampaikan sesuai dengan target audiens yang diharapkan. Semakin sistematis

perencanaan komunikasi politik maka akan berdampak pada peningkatan kualitas kinerja anggota DPRD Nunukan sebagai mitra pemerintah dalam mengawasi jalannya roda pembangunan di Kabupaten Nunukan.

c. Manfaat Digitalisasi Dalam Proses Komunikasi Politik.

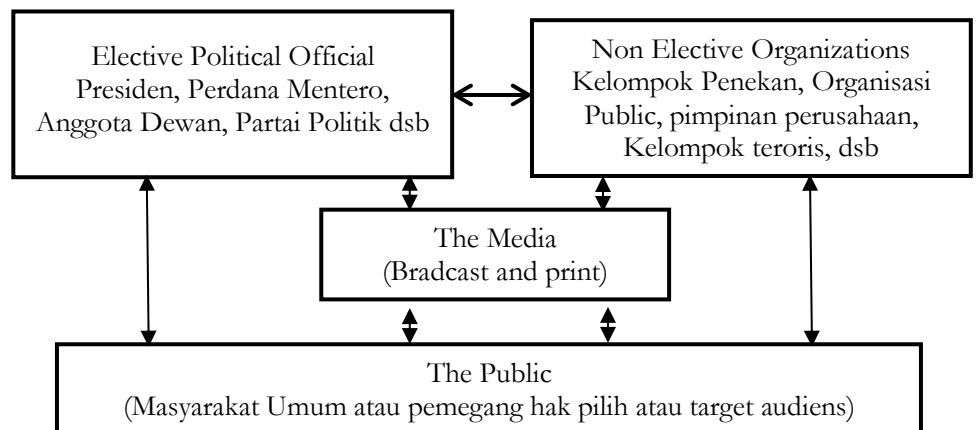
Pureklon dalam Alvin (2022: 14) memetakan proses Komunikasi Politik kedalam dua klasifikasi yang *pertama* adalah proses komunikasi linear. Pada proses ini Komunikasi Politik terkonsentrasi pada pesan dari kelompok yang berkepentingan seperti lembaga legislatif, partai politik yang terkait dengan infrastruktur politik (Political Sphere) yang disalurkan secara langsung (kampanye) atau tidak langsung melalui koran, radio, dan televisi. Proses ini dalam mencapai target yakni masyarakat luas hanya ditentukan satu arah antara pemimpin dan rakyatnya, seperti proses komunikasi politik tradisional di bawah ini.



Gambar 6. Proses Komunikasi Politik Tradisional (Pureklolon dalam Alvin 2022)

Umumnya komunikator politik berada dalam posisi yang lebih tinggi atau memiliki status tertentu, misalnya pemerintah atau petinggi politik menyampaikan pesan kepada audiensnya, ataukah menggunakan media hanya sebagai peneras suara bagi pihak yang berkuasa.

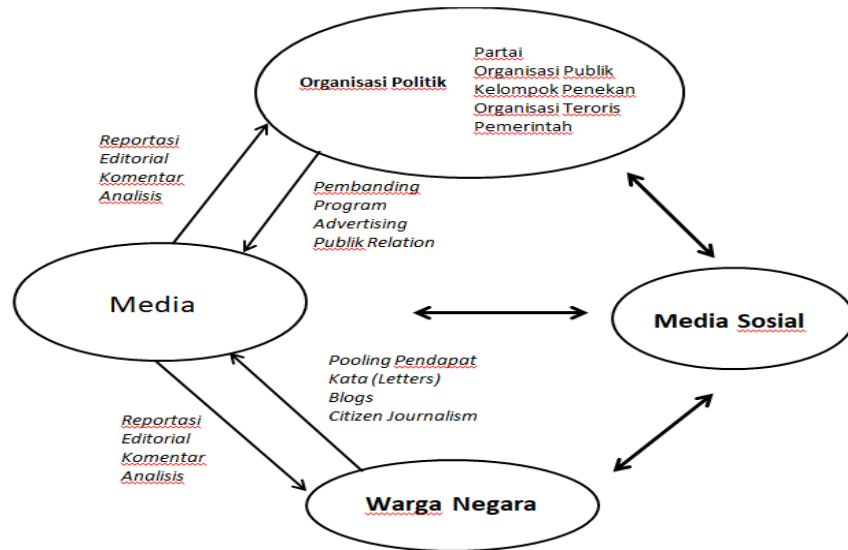
Klasifikasi kedua, proses komunikasi politik vertikal dan horizontal, proses ini melibatkan interaksi yang termediasi oleh arus utama maupun tidak termediasi atau pertemuan langsung antara aktor politik dan public.



Gambar 7. Proses Komunikasi Politik Vertikal dan Horizontal (Pureklolon dalam Alvin 2022)

Menurut Pipit Eko Priyono (2022), Komunikasi dua arah adalah komunikasi yang bersifat timbal balik antara komunikator dan komunikan, dalam prosesnya komunikan diberi kesempatan untuk menanggapi atau merespon komunikatormeski

berlangsung lambat tetapi lebih cermat. Namun kehadiran media baru di era digital membawa suatu perubahan saluran komunikasi politik dua arah menjadi banyak arah, seperti proses komunikasi politik yang dikembangkan oleh McNair 2011.



Gambar 8. Proses Komunikasi Politik Vertikal dan Horizontal (Pureklolon dalam Alvin 2022).

Terkait hal tersebut penulis menemukan dalam observasi, perencanaan proses komunikasi politik di Kantor DPRD Kabupaten Nunukan belum diprogramkan oleh anggota dewan, namun proses komunikasi politik berjalan sesuai kehendak individu dengan latar belakang partai yang berbeda mengakibatkan *mis persepsi* dan lebih mementingkan ego masing-masing fraksi, maka tak heran jika konflik psikologis antara anggota dewan yang satu dengan yang lainnya menimbulkan faksi, padahal yang perlu dikedepankan adalah persatuan, dengan melepas warna partai politik demi mengedepankan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat Kabupaten Nunukan.

Solusinya adalah kesadaran setiap anggota DPRD terhadap tugas fungsinya sebagai pelayan masyarakat, anggota legislatif harus fokus terhadap agenda perencanaan komunikasi politik dalam membangun konstituen, perencanaan dapat merekomendasikan staf sekretariat dewan ataukah masing-masing staf ahli fraksi dengan menyusun strategi komunikasi politik saat sejumlah kegiatan kedewanan akan dilaksanakan. Untuk memanfaatkan flatform digital proses komunikasi politik, diawali dengan penyusunan pesan politik yang bersumber dari aktor politik atau anggota DPRD Nunukan, komunikator inilah menjadi sumber dan kendali semua aktifitas Komunikasi, karena itu jika suatu proses komunikasi tidak berhasil maka kesalahan utama bersumber dari komunikator. Komunikator tidak memahami penyusunan pesan, memilih media yang tepat dan mendekati khlayak yang menjadi target sasaran. Cangara (2020 : 133). Sedikitnya tiga syarat yang harus dipenuhi Komunikator, yakni : memiliki tingkat kepercayaan orang lain terhadap dirinya (kredibilitas), memiliki daya tarik (attractive), dan kekuatan (power). Media sosial dapat menciptakan jejaring sosial membangun isu dan kekuatan yang bisa melahirkan gerakan massa dan setiap pengguna bisa memproduksi informasi dan mendistribusikannya ke banyak pihak secara massif dan unlimited.

KESIMPULAN

Strategi Komunikasi Politik merupakan perencanaan aktor politik dalam menyampaikan target Komunikasi. Anggota DPRD sebagai aktor politik dapat memanfaatkan teknologi internet melalui media sosial sebagai saluran komunikasi politik untuk mempengaruhi masyarakat secara sistematis dan massif ke ruang publik, dampaknya membuka ruang interaktif antara aktor politik dan masyarakat. Dengan menggunakan media digital seperti facebook membuka partisipasi publik diranah komunikasi politik.

Anggota DPRD Nunukan sudah selanjutnya merencanakan strategi komunikasi politik untuk meningkatkan peran legislative di era digital tanpa ada batas, ruang dan waktu berkomunikasi dengan konstituen, semua ini membutuhkan proses komunikasi politik yang tentunya diawali dengan penentuan komunikator, menganalisis khalayak yang menjadi target komunikasi, menyusun pesan dan menentukan media yang tepat dan efektif untuk mempengaruhi pola pikir dan tingkah laku masyarakat agar setiap kebijakan politis dapat mereka pahami dan jalankan demi memajukan pembangunan di wilayah perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

REFERENSI

1. Arriani, Lely. 2010. *Komunikasi Politik, Politisi dan Pencitraan di Panggung Politik*. Bandung: Widya Padjadjaran,
2. Alvin, Silvanus. 2022. *Komunikasi Politik di Era Digital : Dari Big Data, Influencer Relations & Kekuatan Selebriti, Hingga Politik Tawa*. Cetakan Pertama. Yogyakarta: Deepublish.
3. Bungin, Burhan. 2018. *Komunikasi Politik Pencitraan, The Social Construction of Public Administration (ScoPA)*. Cetakan ke -1. Jakarta: Prenamedia Group.
4. Bungin, Burhan, (2007). *Penelitian Kualitatif*. Edisi pertama cetakan ke-4. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
5. Cangara, Hafied. 2020. *Perencanaan & Strategi Komunikasi*. Cetakan Ke 2 Edisi Revisi. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
6. Fisher, Roger. William Ury and Bruce Patton. 2020. *Getting to Yes, Trik Mencapai Kata Sepakat untuk Setiap Perbedaan Pendapat*. Cetakan Kelima (edisi ketiga). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
7. Nurhadi, Zikri Fachrul. 2017. *Teori Komunikasi Kontemporer*. Bandung: Kencana.
8. Nugroho, Riant. 2004. *Komunikasi Pemerintahan, Sebuah Agenda Bagi Pemimpin Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
9. Nimmo, Dan. 2005. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan, dan Media*. Cetakan Keenam, Remaja Rosdakarya, Bandung.
10. Muhazzir, Alfian. 2021. *Komunikasi Politik : Demokrasi, Media Massa, dan Pemilihan Umum di Indonesia*. Cetakan 1. Purwokerto: Zahira Media Publisher.
11. Romli, Asep Syamsul. 2020. *Jurnalistik Online, Panduan mengelola media online, Kiat Blogger, Teknik SEO, Metode Kerja Citizen Journalism*. Cetakan ke IV. Bandung: Nuansa Cendana.